

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSEBILITAS
LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BOYOLALI**



SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh :

DIAN APRIANTI

B 200 110 328

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2015

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul: PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSEBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI Yang ditulis oleh:

Nama : Dian Aprianti
NIM : B 200 110 328
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Penandatanganan berpendapat bahawa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Oktober 2015
Pembimbing



(Dra.Nursiam,M.H.,Ak., CA)

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Drs. Priyono, SE, M.Si)

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data dan membuktikan pengaruh penyajian laporan keuangan, akseibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Daerah di Kabupaten Boyolali

Metode pengambilan sampel menggunakan *metode sampling jenuh* (dari semua populasi di distribusikan kuesioner). Adapun jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 orang. Teknik dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program *SPSS 21*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan, akseibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Kata kunci: *Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan pengetahuan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah saat ini menyebabkan tantangan bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan di daerah agar lebih transparan dalam membuat suatu laporan keuangan daerah. Pemerintah diwajibkan untuk selalu teliti dalam membuat suatu laporan keuangan agar tidak menimbulkan suatu pertanyaan yang menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap laporan keuangan yang telah di buat. Desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, telah menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut Sedarmayanti (2007:38) dalam diana sari (2012) menyatakan bahwa Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat

diterima oleh mereka yang membutuhkan Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimengerti transparansi adalah tata kelola pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Transparansi adalah bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi

Aliyah dkk (2012). Dalaminda dkk (2013) menjelaskan Penyajian laporan keuangan dalam suatu daerah atau kota dibuat atas dasar kesepakatan bersama untuk mempermudah dalam pengecekan suatu laporan keuangan dalam suatu daerah, Laporan keuangan dianggap sangat penting karena merupakan suatu elemen dasar. Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dalam pengertian dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai akseibilitas laporan keuangan dalam suatu daerah atau kota dinilai penting karena merupakan suatu sarana untuk mempermudah memperoleh informasi laporan keuangan. Penelitian ini adalah hasil replikasi dari penelitian Aliyah dan Nahar (2012). Perbedaan penelitian ini terletak pada objek penelitian, pada Aliyah dan Nahar (2012) objek penelitian di kabupaten Jepara sedangkan pada penelitian ini di kabupaten Boyolali.

B. LANDASAN TEORI

1. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan

Mahsun Mohamad (2009:92). Dalam sari diana (2012) menjelaskan bahwa transparansi adalah bahwa individu, kelompok, atau organisasi dalam hubungan akuntabilitas diarahkan tanpa adanya kebohongan atau motivasi yang tersembunyi, dan bahwa seluruh informasi kinerja lengkap dan tidak memiliki tujuan menghilangkan data yang berhubungan dengan masalah tertentu

Menurut LAN dan BPKP (2003) dalam Abdullah (2013) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Menurut Diamond (2002), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan; investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

3. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006) dalam (Aliyah dan Nahar, 2012). Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini diberikan oleh media, seperti surat kabar, majalah, radio, stasiun televisi, website (internet), dan forum yang memberikan perhatian langsung atau peranan yang mendorong akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat (Shende dan Bennet, 2004). Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan

keuangannya, tidak sekedar menyampaikannya ke DPRD saja, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

4. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Abdullah (2009)	Pengaruh penyajian laporan neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh signifikansi terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
Aliyah dan Nahar (2012)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara	Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Diana (2012)	Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengaruh Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indah (2013)	Pengaruh karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten maros	- informasi yang relevan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, - informasi yang andal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan

		keuangan
Rohman (2013)	Pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah
Sukhemi (2011)	Pengaruh Tingkat pengungkapan laporan keuangan terhadap transparansi keuangan daerah	Pengaruh tingkat pengungkapan berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah

5. Hipotesis dan Kerangka Pemikiran

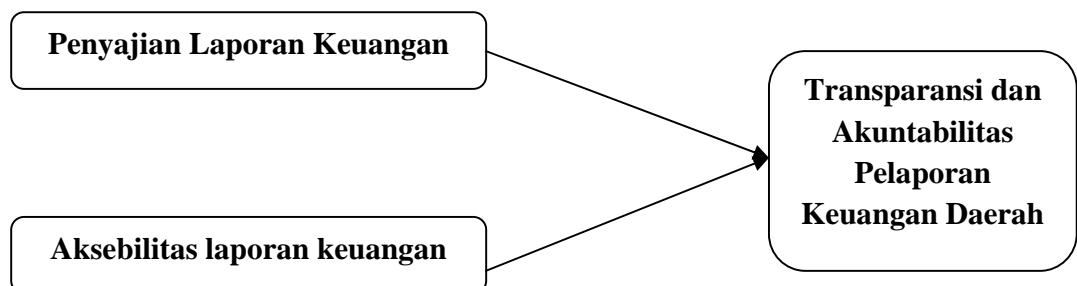
Hipotesis Penelitian:

H₁=Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

H₂=Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian ini:

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan pustaka, dan tinjauan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis

2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Boyolali yang berjumlah 45 orang, Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Boyolali metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling jenuh*, metode *sampling jenuh* adalah teknik pengambilan sampel yang apabila seluruh anggota populasinya digunakan sebagai sampel

3. Definisi Operasional Variabel dan Cara Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerapan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah (Y), variabel independennya adalah penyajian laporan keuangan, akseibilitas laporan keuangan, (X). Semua variabel diukur menggunakan skala Likert yaitu dimana responden menyatakan tingkat setuju atau tidak setuju mengenai keberadaan pernyataan mengenai perilaku, obyek, atau kejadian (Kuncoro, 2003:157). Jawaban akan diberi skor: Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = netral, Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

4. Data dan Sumber Data

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data primer. Dalam penelitian ini, sumber

data yang didapat berdasarkan penyebaran kuesioner di anggota DPRD Kabupaten Boyolali.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji hipotesis, dan uji analisis regresi berganda. Persamaan uji regresi linier bergand

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y= Transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah

X1 = Penyajian Laporan Keuangan Daerah

X2 = Aksebilitas Laporan Keuangan Daerah

a = Konstanta

b1, b2, = Koefisien regresi

e = Error

D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 45 eksemplar, kuesioner yang kembali sebanyak 45 eksemplar. Presentase jumlah responden laki-laki dalam penelitian ini adalah sebanyak 89% dengan jumlah 40 orang dan presentase jumlah responden perempuan sebanyak 11% dengan jumlah 5orang.. Presentase kriteria berdasarkan usia responden <30 tahun 22 %, 31-40 tahun 45 %, 41-50 tahun 33%, 51-60 tahun 0%. Presentase

kriteria responden dalam bidang pendidikan terakhir yaitu SMA sebanyak 20 %, D3 47%, S1 33% dan S2 dengan jumlah 0%.

Pada pengujian validitas menggunakan metode *Pearson Correlation*. Nilai r tabel yang diperoleh dari banyaknya sampel yang berjumlah 45 orang yaitu 0,248. Seluruh item pertanyaan sebanyak 29 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,50$. Variabel Y memiliki nilai 0,843, variabel X_1 memiliki nilai 0,829, variabel X_2 dengan nilai 0,750, variabel X_3 dengan nilai 0,693. Jadi empat variabel penelitian ini dinyatakan valid dan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,70$.

Hasil uji normalitas data mendapatkan nilai Sig 0,135 atau lebih besar dari 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa semua data terdistribusi secara normal. Untuk uji heteroskedastisitas terlihat dari masing-masing variabel sebagai berikut penyajian laporan keuangan (X_1) nilai t_{hitung} sebesar 2,591 dan nilai sig sebesar 0,013, aksesibilitas laporan keuangan (X_2) nilai t_{hitung} sebesar 2,255 dan nilai sig sebesar 0,030. Dari masing-masing variabel nilai sig $> 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel bebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil uji multikolinieritas variabel penyajian laporan keuangan (X_1) nilai *tolerance value* sebesar 0,788 dan nilai VIF sebesar 1,269, aksesibilitas laporan keuangan (X_2) nilai *tolerance value* 0,788 dan nilai VIF sebesar 1,269 dan terlihat dari semua variabel nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga ketujuh variabel dinyatakan bebas multikolinieritas.

Hasil persamaan regresi liner berganda sebagai berikut:

$$\text{Trans dan Alk} = 3,567 + 0,295\text{PLKD} + 0,422\text{ALKD} + e$$

Nilai koefisien dari masing-masing variabel independen bernilai positif yang memberikan gambaran bahwa terdapat hubungan yang positif dari variabel

penyajian laporan keuangan (X_1), aksesibilitas laporan keuangan (X_2), terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah (Y). Variabel penyajian laporan keuangan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,917 dan nilai signifikan sebesar $0,006 < 0,05$ yang berarti variabel penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Variabel aksesibilitas laporan keuangan (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,182 dan nilai signifikan sebesar $0,035 < 0,05$ yang berarti variabel aksesibilitas laporan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 12,138 dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan. Hasil nilai koefisien determinasi (R^2) untuk kedua variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan nilai *adjusted R square* sebesar 0,352 yang berarti bahwa penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, mempengaruhi penerapan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan sebesar 35,2% sedangkan sisanya 64,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Pembahasan dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk variabel penyajian laporan keuangan daerah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah, yang mana dapat ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,917 > 2,018$). Hal ini disebabkan karena dengan adanya SKPD mampu menyusun laporan keuangan, SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan, informasi yang terbuka, informasi harus dibandingkan dengan periode sebelumnya, laporan keuangan tahun ini dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, bebas dari kesalahan material, laporan keuangan memenuhi

kebutuhan para pengguna informasi maka penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan meningkat.

2. Untuk variabel aksesibilitas laporan keuangan dalam penelitian ini. Menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah, yang mana ditunjukkan oleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,182 > 2,018). Hal ini terjadi karena adanya aksesibilitas laporan keuangan yang tinggi terhadap masyarakat, maka akan meningkatkan penerapan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali. Hal ini disebabkan karena dengan adanya aksesibilitas laporan keuangan yang tinggi yang meliputi SKPD mampu menyusun laporan keuangan, SKPD mampu menyelesaikan laporan keuangan, informasi yang terbuka, hasil pengujian oleh lebih dari pihak harus menunjukkan simpulan yang tidak beda jauh, informasi harus dapat dibandingkan periode sebelumnya, laporan keuangan tahun ini dapat dijadikan tolak ukur dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya, bebas dari material, laporan keuangan memenuhi kebutuhan para pengguna informasi.

E. PENUTUP

1. **Kesimpulan.** Variabel yang berpengaruh positif terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Boyolali, sebagai berikut: Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas laporan keuangan,
2. **Keterbatasan.** Hasil penelitian ini hanya memfokuskan pada satu wilayah DPRD yaitu DPRD Kabupaten Boyolali sehingga penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan. Penelitian ini hanya menggunakan metode survei kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara, sehingga kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan pada data yang dikumpulkan melalui pengguna

instrumen secara tertulis saja. Keterbatasan sampel penelitian ini hanya menggunakan jumlah sampel sebanyak 45 responden. Variabel yang diteliti hanya penyajian laporan keuangan, akseibilitas keuangan, sedangkan masih banyak lagi faktor lainnya yang berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

- 3. Saran.** Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di DPRD Kabupaten Boyolali, tetapi juga di DPRD Kabupaten lain. Sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi saja tetapi juga yang lebih tinggi. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas objek penelitian, tidak hanya pada DPRD Kabupaten Boyolali tetapi juga di Kabupaten lainnya, sehingga masalah dapat di generalisasikan, Penelitian selanjutnya sebaiknya tidak hanya dapat menggunakan metode survei dengan cara menyebarkan kuesioner saja, tetapi juga ditambah dengan melakukan wawancara secara langsung, agar peneliti dapat melihat langsung bagaimana responden memberikan jawaban. Penelitian berikutnya, hendak dapat menambahkan variabel independent yang sejenis dengan beberapa karakteristik *good governance* yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- AbdullahSyukriy. (2009). *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*.Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1
- Abdullah, S. dan Asmara, J.A. (2006). *Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah; Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Padang.
- Aliya Dan Nahar. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan AksesibilitasLaporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi DanAkuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189
- Astuti, ratih muji.2008.*Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan interen terhadap kinerja pemerintah daerah (studi kasus pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerahDPPKAD) kabupaten grobogan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Badjuri, dkk. 2009. Audit kinerja pada sektor publik pemerintah. <http://hardiyantowb.wordpress.com>. Diunduh 16 maret 2009
- Diana, sari. 2012.*Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. SNAB bandung
- Diamond, Jack. 2002. *Performance Budgeting – Is Accrual Accounting Required*. IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi analisis multivariate dengan program spss*. Semarang : badan penerbit universitas diponegoro
- Ghozali, imam. 2011. “aplikasi analisis mulivariate dengan program spss”. Semarang: badan pemerbit universitas diponegoro.
- Halim, Abdul.2008. *Akuntansi keuangan daerah*. Edisi ketiga, Penerbit salemba empat,jakarta.
- Halim, Abdul.2002.aAkuntansi dan pengendalian keuangan daerah. Edisi seri bunga rampai. Penerbit upp amp ykpn.yogyakarta.

- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi dan pengendalian pengelolaan keuangan daerah. Edisi revisi seri bunga rampai manajemen keuangan daerah, penerbit upp stimp ykpn.yogyakarta.
- Indah,dkk. 2013. *Pengaruh karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten maros*. Jurnal akuntansi
- Krisna, 2014. *Pengaruh akuntabilitas, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan anggaran keuangan daerah (APBD) (Studi empiris pada Dprd kota pati jawa tengah)*. Universitas muhammadiyah surakarta.skripsi tidak dipublikasikan.
- Manangkalangi, kurniawan M, 2013.*Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara* . jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 22-31
- Halim. Abdul. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2000. Reformasi pengelolaan keuangan daerah: implementasi value for money audit sebagai antisipasi terhadap tuntutan akuntabilitas publik. *Jurnal akuntansi & auditing indonesia* (JAAI): Vol. 4 No. 1
- Mardiasmo, 2001, *Pengawasan, Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo(ed). 2002. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: penerbit andi
- Mulyana, Budi, 2006, “ *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*”, Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Republik indonesia.Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, neraca pembukaan
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Republik Indonesia. Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Rohman Abdul. 2013. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas*. Jurnal akuntansi 2013

_____, *Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Shenden, suresh dan tony bennet. 2004. Concept paper 2: transparance and accountability in public financial administration. UN DESA. <http://www.unpan.org>

Sugiyono, 2006. *metoda penelitian bisnis*. Cetakan kesembilan, CV Alfabeta, Bandung

Sukhemi, 2010. *Pengaruh Penyajian Nerca Daerah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Volume 5, April: 85-100

Wahyuni, sri putu dkk, 2014. *Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan akuntabilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah*. jurnal akuntansi S1 volume 2 No. 1 tahun 2014

Windrastuti indah dkk. (2013). *Pengaruh Karakteristik Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros*. Universitas Hasanuddin, Makassar.